



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 18 Juni 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.20 WIB s.d 14.30 WIB
Tempat	: Hotel Ayana Midplaza Ballroom I Jakarta Pusat
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan Mei 2019. 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos, MSi
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah:
 - 1) Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan Mei 2019;
 - 2) Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
3. Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengenai capaian terhadap target pelaksanaan APBN TA 2019 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2019. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

No.	Unit Kerja/ Program	PAGU KEBUTUHAN TA 2020	PAGU INDIKATIF TA 2020	PENYESUAIAN PAGU INDIKATIF TA 2020
1.	Ditjen Perhubungan Darat (Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat)	12.879.365.779	4.150.432.168	5.754.711.800
2.	Ditjen Perkeretaapian (Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian)	24.613.431.369	13.084.812.318	12.008.709.953
3.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek)	2.774.028.061	778.387.866	606.587.093

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan pagu anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPR RI.

3. Sebagai tindaklanjut Rapat Kerja tanggal 12 Juni 2019, maka Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan saran dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 18 Juni 2019

KETUA RAPAT,



LASARUS

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



BUDI SETIYADI

DIRJEN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



ZULFIKRI

KEPALA BPTJ
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



BAMBANG PRIHARTONO